



HS Kecewa Banyak Kepsek Tidak Hadir

Bahas Sosialisasi Pengaduan di Masyarakat

JOGJA - Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) kecewa dan marah karena banyak kepala sekolah (kepsek) SMP negeri di Kota Jogja yang tidak hadir dalam Lokakarya Pengaduan Masyarakat di Balai Kota Jogja kemarin (7/8). Kehadiran mereka hanya diwakilkan. Kepada mereka, HS meminta untuk segera menemuinya di ruang kerjanya.

Ya, saat akan memulai acara lokakarya kerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM itu, HS mengabsen kembali 16 para kepala SMP negeri. Hasilnya hanya beberapa saja kepsek yang hadir, sisanya diwakilkan wakil kepsek, bahkan ada yang diwakilkan kepala bagian TU. "Harusnya acara sepeenting ini bisa datang sendiri. Yang tidak hadir suruh ke kantor saya," tegasnya. Menurut HS pengaduan masyarakat tidak selalu diartikan sebagai keluhan, tapi juga bisa merupakan saran dan masukan. Untuk itu HS meminta pada jajaran sekolah di Kota



EVALUASI : Kegiatan Lokakarya Pengaduan Masyarakat di Balai Kota Jogja kemarin (7/8).

Jogja supaya tidak takut jika ada aduan dari masyarakat. Terlebih pada saat ini, media penyampaian pengaduan dari masyarakat makin beragam. "Pemkot Jogja, termasuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Jogja juga harus berbenah seiring dengan perubahan di masyarakat," pesannya.

Kepala PSKK UGM Agus Heruanto Hadna mengatakan layanan pengaduan masyarakat yang dimiliki Pemkot Jogja saat ini, Unit Pengaduan Informasi dan

Keluhan (UPIK), bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi melalui smartphone, hampir semua kalangan masyarakat memiliki. Hal itu juga untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan. "Untuk merealisasikannya tidak butuh biaya besar," katanya.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Jogja Kris Sarjono Sutejo menambahkan 16 SMP negeri di Kota Jogja akan menjadi sasaran survei pengaduan layanan

dari masyarakat guna mengidentifikasi permasalahan yang kerap terjadi yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan. Berbagai permasalahan, bisa diadakan mulai dari sarana dan prasarana yang kurang atau kekurangan tenaga pengajar. "Nantinya janji perbaikan tidak hanya berasal dari dinas pendidikan atau SMP tetapi juga instansi lain di lingkungan pemerintah misalnya saja bagian pengelolaan keuangan dan aset daerah," katanya.

Dari hasil pengamatan awal, sejumlah permasalahan yang dikeluhkan di antaranya adalah keterbatasan fisik, kekurangan sumber daya manusia, proses penerimaan siswa baru, kuota siswa miskin, kenakalan remaja, pungutan saat wisuda hingga seragam siswa. Menurut Kris, survei pengaduan masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan tahun ini tetapi sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir dengan sasaran survei yang berbeda-beda.

"Tahun ini, kami melakukan evaluasi terhadap dampak janji perbaikan yang sudah disampaikan puskesmas dan dinas. Harapannya, layanan menjadi semakin baik," katanya. (pra/din/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005